

**MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI MODEL  
PEMBERDAYAAN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI**  
(*INCREASING COMMUNITY PARTICIPATION THROUGH  
EMPOWERMENT MODELS TO IMPROVE THE ECONOMY*)

<sup>1</sup>Hari Susanto, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unars

<sup>2</sup>Senain, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unars

<sup>3</sup>Farida Hanum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unars

<sup>1</sup>Email: harisusanto@unars.ac.id

**Abstrak**

Partisipasi masyarakat selalu terkait dengan pembangunan, khususnya pada peningkatan ekonomi yang menyangkut secara langsung kehidupan masa depan mereka, yakni dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam di daerahnya masing-masing. Namun di era sekarang ini, partisipasi masyarakat cenderung belum menampilkan wujud nyata, sehingga perlu dilibatkan peran komunitas, lembaga, maupun perguruan tinggi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tersebut.. Partisipasi masyarakat sudah dilindungi dalam konstitusi, yakni jaminan untuk mengelola sumberdaya alamnya, hal ini akan berdampak pada perubahan perilaku dan *mindset* sehingga akan meningkatkan kondisi sosial ekonominya. Partisipasi masyarakat disebabkan oleh kesadaran yang muncul dari seseorang atau komunitas melalui proses belajar atau tranfer ilmu, sehingga mereka berdaya, inilah yang dikatakan pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan proses dan perbuatan yang membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu berupa tindakan akal, atau upaya untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik material maupun spiritual guna mencapai cita-cita dan tujuan suatu bangsa. Pemberdayaan akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerahnya melalui sektor ekonominya. Partisipasi masyarakat merupakan salahsatu prinsip *Good Governance* yang diterapkan oleh pemerintah desa dengan melakukan program-program desa termasuk pada peningkatan ekonomi desa. Pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pelatihan yang dilaksanakan di Kantor Desa Bletok Kabupaten Situbondo pada Hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan, Peningkatan Ekonomi

---

***Abstract***

Community participation is always related to development, especially on economic improvement that directly concerns their future lives, namely in the management of the potential of natural resources in their respective regions. However, in the current era, community participation tends not to show its real form, so it is necessary to involve the role of communities, institutions, and universities to mobilize community participation. Community participation has been protected in the constitution, namely the guarantee to manage their natural resources, this will have an impact on changes in behavior and mindset so that it will improve their socio-economic conditions. Community participation is caused by awareness that arises from a person or community through a learning process or transfer of knowledge, so that they are empowered, this is what is said to be empowerment. Empowerment is a process and action that makes empowered, namely the ability to do something in the form of an act of reason, or an effort to develop various aspects of community life both material and spiritual in order to achieve the ideals and goals of a nation. Empowerment will increase community participation for regional development through its economic sector. Community participation is one of the principles of Good Governance applied by the village government by conducting village programs including improving the village economy. Empowerment to increase community participation in the form of training was held at the Bletok Village Office, Situbondo Regency on Wednesday, October 9, 2024.

**Keywords:** Community Participation, Empowerment, Economic Improvement

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat sering disebutkan untuk pembangunan daerah, menurut UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa tujuan utama reformasi bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bank Dunia melalui *Macro Poverty Outlook* menyebutkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Perbedaan angka ini memang terlihat cukup besar, namun penting untuk dipahami bahwa keduanya tidak saling bertentangan. Perbedaan muncul disebabkan adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda. Dalam kasus ini, garis kemiskinan rumah tangga tersebut adalah Rp4.230.425 per bulan. Angka inilah yang lebih representatif untuk memahami kondisi sosial ekonomi rumah tangga tersebut. (<https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>).

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas program pembangunan nasional. Kemiskinan sebagai masalah bangsa merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi di semua negara, khususnya negara berkembang. Kemiskinan tidak terbatas pada ketidakmampuan ekonomi, namun merupakan kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar warganegara dalam menjalani dan mengembangkan kehidupan yang layak setiap harinya. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan tidak hanya pada persoalan ekonomi dan teknologi, namun juga menyangkut persoalan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks inilah, kegiatan membangun masyarakat juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat karena di

samping menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan, juga berharap masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif pada pengelolaan kemampuan dirinya. Kenyataannya bahwa inisiatif itu hanya dilakukan oleh pemerintah dan tidak pernah diletakkan pada masyarakat, perjalanan pembangunan diwarnai oleh pelbagai bentuk monopoli dan manipulasi. Pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat terutama kaum miskin menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi (sekaligus politik). ([https://lib.litbang.kemendagri.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=1606](https://lib.litbang.kemendagri.go.id/index.php?p=show_detail&id=1606)).

Keterkaitan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat karena pelaku pembangunan dan pemberdayaan adalah manusia. Kesemuanya sejalan dengan perkembangan dan kondisi lingkungan yang disebabkan berbagai faktor-faktor, baik faktor baik internal maupun eksternal. Indonesia adalah merupakan daerah yang sangat luas dan angka kemiskinan masih sangat besar, persoalan-persoalan tersebut tentu terjadi karena ada penyebabnya dikarenakan oleh berbagai macam persoalan, hal ini sudah melekat di tubuh rakyat indonesia sejak dinyatakan merdeka, namun dengan perubahan-perubahan terjadi pemberdayaan masyarakat adalah sebuah hal yang harus ditingkatkan, agar kemerdekaan itu benar-benar terasa pada rakyat indonesia umumnya.

Menurut Todaro (dalam Suaib, 2023:3-4) pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang menyangkut reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sistem sosial sebagai keseluruhan. Karena itu disamping peningkatan pendapatan dan *out put* maka pembangunan juga menyangkut perubahan radikal pada struktur kelembagaan, struktur sosial dan struktur administratif, perubahan sikap, adat kebiasaan dan kepercayaan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* perlu direorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau oleh Chambers dalam Anholt (2001) sering dikenal dengan semboyan "*put the farmers first*"

Sedangkan Pemberdayaan (*empowerment*) adalah pemberian kemampuan kepada pihak yang lemah atau dilemahkan secara politis dan struktural. Setidaknya ada tiga kata kuncinya dari kata *Empowerment*, yaitu: partisipasi, transparansi, dan demokrasi. Pemberdayaan mensyaratkan peran serta yang setara antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan partisipasi yang penuh, dan suasana yang demokratis, maka diharapkan akan terjadi alokasi-alokasi sumberdaya ekonomi, distribusi manfaat, dan

akumulasi, sehingga dicapai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan lapisan terbawah. (Suaib, 2023:4).

Menurut Sulekale (2022), pemberdayaan sebagai upaya dalam membangun daya masyarakat dengan cara memotivasi, mendorong serta membangkitkan kesadaran atas potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mengembangkannya. Sedangkan Anwas (2013:49) mengartikan bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses untuk memberikan daya (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*) dan meminimalisir pihak yang terlalu menguasai. Kedua pendapat tersebut menyatakan bahwa pemberdayaan adalah motivasi yang membangkitkan seseorang atau komunitas untuk mengembangkan potensi atau power yang dimilikinya. Sulistyani (2004 dalam Ariyani, Erma, Avela Dewi, Hj. Aulia, 2021:51) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

World Bank yang menyebutkan bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. (Mardikanto dan Poerwoko, 2013).

Pemberdayaan Masyarakat (*Society Empowerment*) adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. (<https://paralegal.id/pengertian/pemberdayaan-masyarakat/>).

Wijaya (2003) menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat, agar masyarakat dapat memaksimalkan jati diri, harkat dan martabatnya agar dapat bertahan dan berkembang secara mandiri baik secara ekonomi, sosial, agama dan budaya. (<https://blog.sahabatpedalaman.org/pemberdayaan-masyarakat/>).

Ariyani dkk. (2021:51) menyatakan bahwa tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya kemandirian. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang ditandai oleh kemampuan untuk berpikir, memutuskan suatu hal yang

dipandang tepat demi pemecahan masalah dengan menggunakan kemampuan atau daya yang dimiliki. Nurhidayat (2023:12) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa merupakan upaya mentransformasi pertumbuhan masyarakat menjadi kekuatan masyarakat yang nyata, melindungi dan memperjuangkan nilai dan kepentingan dalam segala aspek kehidupan.. Selanjutnya Zubaedi (2013 dalam Nurhidayat, 2023:15) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *peoplecentered, partipatory, empowering, and sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut

Umumnya pemberdayaan untuk keluarga itu ditujukan pada kaum perempuan (ibu-ibu), mengingat bahwa kebanyakan kaum perempuan yang mengetahui kebutuhan rumahtangganya. Banyak program-program yang ditujukan untuk perempuan, hal ini bertujuan untuk membantu perempuan di desa tersebut untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Mereka diberikan pelatihan kewirausahaan dan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk memulai usaha mereka sendiri.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Prinsip Dan Tujuan Pemberdayaan, pemberdayaan bertujuan dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan pekerjaan untuk pengentasan rakyat dari permasalahan kemiskinan. Pemberdayaan perempuan memiliki bidang garapan yang luas.

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya (Zakiyah, 2010 dalam

[https://www.researchgate.net/publication/362252947\\_Model\\_Pemberdayaan\\_Perempuan#pf39](https://www.researchgate.net/publication/362252947_Model_Pemberdayaan_Perempuan#pf39)).

Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu strategi yang penting dalam meningkatkan peran serta perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya untuk dirinya sendiri, keluarga dan masyarakatnya. Munculnya kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, supaya pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak.

Tika Widiastuti (dalam <https://unair.ac.id/pemberdayaan-perempuan-di-indonesia-dalam-peran-ekonomi/>) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga sektor swasta. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah Model Penta Helix, yang menggabungkan berbagai dimensi, seperti ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan solusi holistik yang dapat memperkuat peran perempuan dalam perekonomian, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan media, Indonesia memiliki potensi untuk memperbaiki posisi perempuan di tingkat global. Langkah konkret yang melibatkan semua pihak ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana kesetaraan gender tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga tercermin dalam kebijakan, akses, dan peluang yang setara bagi perempuan.

Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi solusi penting untuk memperbaiki situasi ini. Perempuan Indonesia memainkan peran besar dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menyumbang 61% dari PDB nasional. Meskipun demikian, Indonesia masih tertinggal dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurut laporan INSEAD, Indonesia berada di peringkat ke-109 dari 134 negara dalam hal pemberdayaan ekonomi perempuan, sebuah posisi yang menggambarkan perlunya langkah-langkah signifikan untuk mencapainya. Peran perempuan dalam ekonomi Indonesia tidak perlu diragukan lagi. seperti yang telah disinggung sebelumnya, Sekitar 54% pelaku UMKM didominasi oleh perempuan. Bahkan, pada bidang investasi, peran perempuan mencapai angka 60%. (<https://www.ocbc.id/id/article/2023/04/03/peran-perempuan-dalam-ekonomi>)

Pentingnya pemberdayaan perempuan terutama pada keluarga miskin perlu adanya kegiatan aksi nyata dalam bidang sosial ekonomi (Hanis & Marzaman, 2020:



123– 135). Salah satu cara untuk memberdayakan perempuan adalah kegiatan yang mendukung kemampuan yang dimiliki perempuan dalam mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya dalam semua aspek kehidupan (Esquivel & Sweetman, 2016). Menurut Sita & Herawati (2017 dalam Sri Juslaeni, Nur Wahid, Riskasari. 2024) Perempuan dan tugasnya dalam kehidupan sangat dekat dengan perekonomian, karena kehidupan ekonomi merupakan usaha manusia dalam memelihara hidup memenuhi kebutuhan primer.

Sabrina (2023:33) menyatakan bahwa peranan perempuan dalam keterlibatan secara aktif pada pemberdayaan perempuan mengacu pada konsep dari partisipasi yang diberikan, yaitu peran serta dari perempuan baik secara mental maupun emosional di suatu kelompok. Lebih lanjut, partisipasi perempuan dapat mencakup sumbangan berupa tenaga, pikiran hingga material dalam mendukung proses mencapai tujuan yang ditetapkan. Partisipasi yang diberikan oleh perempuan pun dapat memberikan adanya peranan dalam pemberdayaan, terutama berlaku bagi para perempuan yang tergabung dalam kegiatan guna pembangunan masyarakat.

Hasil penelitian Marya Tisnandya dkk (2021) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan pada ekonomi keluarga paling besar dilakukan dalam bentuk partisipasi tenaga, uang, dan harta benda. Sedangkan faktor yang paling berpengaruh adalah faktor kemampuan untuk memanfaatkan hasil pelatihan dan mengelola usaha mikro yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan itu dilakukan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Situbondo di Desa Blitok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Permensos No 8 Tahun 2012 adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Program PMKS dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan secara fisik berupa kerajinan dari rotan sintesis. Pelatihan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga khususnya jiwa kewirausahaan anggota keluarga sehingga dapat berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sebelum dilakukannya pelatihan, terlebih dahulu pemberian materi berupa penyuluhan Pelatihan



Manajemen Kewirausahaan, Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Melalui Model Pemberdayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.

## **METODE**

Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) sesungguhnya terfokus untuk meningkatkan taraf hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha, hal ini khususnya pada sektor ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut agar terwujud, diperlukan berbagai usaha untuk memotivasi dalam bentuk bantuan modal, fasilitas dan pengembangan sumber daya manusia seperti halnya dalam bentuk pelatihan, penyuluhan dan praktek langsung pada bidang industri dan lain sebagainya. Sasaran dari pemberdayaan masyarakat adalah kaum perempuan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial juga untuk kemajuan ekonomi pada keluarga dan masyarakat sekelilingnya. Ketika perempuan memiliki pendidikan dan kesempatan yang sama, mereka dapat berkontribusi pada bidang ekonomi.

Bentuk pemberdayaan perempuan dalam upaya kemandirian ekonomi berupa penyuluhan, pelatihan keterampilan dan program pendampingan usaha, tranfer ilmu dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan diadakan di Pendopo Desa Bletok Kecamatan Bungatan pada Hari Rabu dan Kamis / 09 dan 10 Oktober 2024, sebagai penyelenggara kegiatan adalah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, sedangkan peserta kegiatan ini semuanya 20 orang terdiri dari ibu rumah tangga..

Kegiatan pengabdian ini berdasarkan pada permohonan Narasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Situbondo bernomor 400.9.12.2/3015/431.305/2024 tertanggal 07 Oktober 2024, pemateri kegiatan pelatihan ini terdiri dari 3 orang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unars Situbondo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan di Desa Bletok Kecamatan Bungatan, dimana pihak pemerintah desa menyediakan tempat pelatihan. Narasumber kegiatan berasal dari Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan Instruktur Pelatihan merupakan anggota Tim Penggerak PKK Kecamatan Situbondo. Adapun Peserta Pelatihan ini sebanyak 20 (dua puluh) orang berasal dari Desa Bletok. Pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari. Kegiatan Hari Pertama dilaksanakan Hari Rabu, 09 Oktober

2024 berupa Pemaparan Narasumber atau pemberian materi dengan 3 tema oleh 3 dosen Fisip Unars Situbondo, sedangkan hari Kedua dilaksanakan Kamis, 10 Oktober 2024 berupa pelatihan dilanjutkan praktek tentang praktik pembuatan toples dari rotan sintetis.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa, seperti misalnya; Pemberdayaan UKM, Industri rumah tangga, Badan Usaha Milik Desa; KUBE (Kelompok Usaha Bersama); Kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa Pendidikan Dan Pelatihan, workshop, pemberian bantuan modal, bantuan alat produksi, serta pemberian bantuan alat dan bahan keterampilan yang meliputi : satu buah solder, satu buah stop kontak, satu buah gunting dan 5 kg rotan sintetis. Dalam mengolah lingkungannya, masyarakat Desa Blitok tergolong masyarakat nelayan sehingga bis amemberdayakan atau mengolah hasil perikanan laut seperti halnya pembuatan kripik kulit ikan.

Pada penguatan Manajemen Kewirausahaan para ibu-ibu selayaknya mempunyai jiwa wiraswasta, mempunyai keberanian, keutamaan dan keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Seseorang juga mempunyai sifat, watak dan ciri-ciri berkemauan keras untuk mewujudkan dan mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif yang dimiliki ke dalam kegiatan yang bernilai, hal ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup setiap harinya.

Seseorang akan merasakan adanya tantangan untuk berpikir kreatif dan bertindak inovatif sehingga tantangan teratasi dan terpecahkan, munculnya ide kreatif dan inovatif wirausaha tidak sedikit yang diawali dengan proses imitasi dan duplikasi, kemudian berkembang menjadi proses pengembangan dan berujung pada proses penciptaan sesuatu yang baru, berbeda dan bermakna serta tahapan penciptaan sesuatu yang baru, berbeda dan bermakna, dengan demikian seseorang perempuan atau para ibu-ibu akan memiliki jiwa kewirausahaan. Tingkat kewirausahaan yang tinggi sering kali terlihat di kalangan perempuan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah dimana pilihan pekerjaan layak terbatas, hal ini menggarisbawahi hubungan penting antara pekerjaan dan kewirausahaan.” (Sumber: Global Entrepreneurship Monitor

(2021). Laporan Kewirausahaan Perempuan GEM 2020/2021. Berkembang pesat di tengah krisis

Peserta pelatihan yang terdiri dari para ibu-ibu seharusnya juga mengerti dan mengetahui tentang ciri-ciri jiwa wirausaha, yaitu di antaranya adalah:

1. penuh percaya diri, dengan indikator penuh keyakinan, optimis, disiplin, berkomitmen dan bertanggungjawab;
2. memiliki inisiatif, dengan indikator penuh energi, cekatan dalam bertindak dan aktif;
3. memiliki motif berprestasi dengan indikator berorientasi pada hasil dan berwawasan ke depan;
4. memiliki jiwa kepemimpinan dengan indikator berani tampil beda, dapat dipercaya dan tangguh dalam bertindak; dan [berani mengambil risiko](#) dengan penuh perhitungan.
5. Berorientasi pada tugas dan hasil, tidak perlu gengsi
6. Berorientasi ke masa depan, visi yang jelas.

Dengan adanya jiwa kewirausahaan perempuan atau para ibu akan berdaya dan muncul kemampuan untuk bisa lebih mandiri. Pemberdayaan adalah upaya penguatan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dirinya. Tujuan dari pemberdayaan perempuan di pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan gender
3. Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan
4. Untuk mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat dan perlindungan anak.

Dengan demikian para ibu-ibu akan mengetahui tentang potensinya, sehingga mampu mengembangkan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya, atau mengelola bahan-bahan rotan plastik, ikan-ikan hasil laut sehingga menjadi komoditas yang

menghasilkan uang untuk keperluan sehari-hari.

Untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan berbagai upaya perlu dilakukan.

1. Pemerintah perlu mendorong pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan yang berkualitas dan pelatihan yang relevan akan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja dengan lebih baik. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan akses perempuan terhadap modal usaha dan kepemilikan aset produktif.
2. Perlu adanya dukungan dari sektor swasta dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah perempuan. Para pelaku industri perlu mendorong kebijakan kesetaraan gender, seperti pengadaan tempat penitipan anak di tempat kerja, kesetaraan gaji, dan kebijakan lain yang mendukung perempuan dalam bekerja.

## KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat khususnya para ibu-ibu adalah urgen untuk dilaksanakan, kemandirian untuk meningkatkan ekonomi keluarga dengan pengelolaan sumberdaya alamnya. Dengan melibatkan dinas maupun perguruan tinggi, diharapkan terjadinya sinergitas untuk menguatkan kemandirian para ibu-ibu untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan khususnya sektor peningkatan ekonomi keluarga di bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan gender, kemandirian organisasi perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak. Melibatkan dinas seperti Dinas Sosial karena memang sudah tupoksinya, sedangkan bersinergi dengan perguruan tinggi karena memang kewajibannya dalam Tridharmanya untuk pengabdian di masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan akan lebih optimal apabila mampu secara mandiri dalam mengelola potensi sumberdaya alamnya seperti pengelolaan hasil tangkapan ikan, salah satunya membuat keripik/kerupuk yang bahannya dari kulit ikan, pembuatan rengginang dan lain sebagainya, dengan dilandasi

jiwa kewirausahaan lalu dipasarkan sehingga akan meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat.

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H. Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
2. Dr. Nanda Widaninggar, S.E., M.Ak., Ak., CA., CIQaR. selaku Kepala LP2M Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
3. Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos., M.Si, selaku Dekan Fisip Unars Situbondo
4. Ir. H. Timbul Surjanto, M.M, Kepala Dinas PMD Kabupaten Situbondo.
5. Ahmad Bajuri Soleh, Kepala Desa Bletok Kecamatan Bungatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erma Ariyani, Avela Dewi, Hj. Aulia. 2021. *Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Wilayah Kelurahan Sungai Andai Kota Banjarmasin*. Jurnal PubBis : Vol. 5, No. 1, 2021. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
- Esquivel, V., & Sweetman, C. 2016. *Gender and The Sustainable Development Goals. Gender & Development*, 24(1). <https://doi.org/10.1080/13552074.2016.1153318>
- Global Entrepreneurship Monitor (2021). Laporan Kewirausahaan Perempuan GEM 2020/2021. *Berkembang pesat di tengah krisis*
- Hanis, N. W., & Marzaman, A. (2020). *Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga*. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 8(2). pp.
- Imaduddin, M. .2020. Is It Possible to Prevent Radicalism through Women's Participation in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) Education?: Challenges and Opportunities. PALASTREN: Jurnal Studi Gender, 13(1). <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/4157>
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Marya Tisnandya, Landung Esariti, Mada Sophianingrum. 2021. *Kajian Partisipasi Perempuan Pada Perekonomian Keluarga Di Kampung Pelangi Randusari*. Jurnal Planologi E-ISSN : 2615-5257 Vol. 18, No. 2, Universitas Sultan Agung. Semarang.
- Nurhidayat, Ipan. 2023. *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran*. Journal E-Gov Wiyata: Education and Government Volume 1 Nomor 1, Februari 2023.
- Oos M Anwas. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Jakarta: Alfabeta.

- Rosramadhana, Sudirman, Zulaini, Muhammad Iqbal, Purnama Sari, Rahmat Siregar, Sulistia Rachmah. 2022. *Model Pemberdayaan Perempuan (Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan)*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Sabrina Janneta Agisti Bahri, Refti Handini Listyani. 2023. *Pengaruh Tingkat Partisipasi dalam Pemberdayaan Perempuan pada Peningkatan Kesejahteraan Keluarga* Jurnal Paradigma, Volume 12, Number 03. Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
- Sri Juslaeni, Nur Wahid, Riskasari. 2024. *Pemberdayaan Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Journal Kimap: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik. Volume 5, Nomor 4, Agustus 2024. Sulekale, Daniel. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah*, Diakses melalui [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=ARTIKEL+DANIEL+SULEKALE&btnG](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ARTIKEL+DANIEL+SULEKALE&btnG) pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Pukul 11.58 WIB.
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang Prinsip Dan Tujuan Pemberdayaan.  
<https://www.ocbc.id/id/article/2023/04/03/peran-perempuan-dalam-ekonomi>)  
<https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>  
[https://lib.litbang.kemendagri.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=1606](https://lib.litbang.kemendagri.go.id/index.php?p=show_detail&id=1606)  
<https://unair.ac.id/pemberdayaan-perempuan-di-indonesia-dalam-peran-ekonomi/>  
[https://www.researchgate.net/publication/362252947 Model Pemberdayaan Perempuan#pf39](https://www.researchgate.net/publication/362252947_Model_Pemberdayaan_Pemempuan#pf39)